

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS
DALAM DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI
BAWAH TANGAN (WAARMERKING) YANG TANDA
TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN**



Diajukan Oleh:
FLORA JENITA ALISTYA
NIM 2420216320007

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
2026**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS
DALAM DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI
BAWAH TANGAN (WAARMERKING) YANG TANDA
TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN

Usulan Penelitian Untuk Tesis S-2 Program Magister Kenotariatan

Diajukan Oleh
FLORA JENITA ALISTYA
NIM 2420216320007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
2026

Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
Pada Tanggal 07 Juli 2026

PEMBIMBING



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

**Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji Pada
Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Flora Jenita Alistya

NIM : 2420216320007

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 07 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



FLORA JENITA ALISTYA
NIM 2420216320007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

FLORA JENITA ALISTYA

NIM 2420216320007

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM
DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN
(WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 9%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 28 Juli 2026



**Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum**

**Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM**

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM
DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN
(WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN

Oleh :

Flora Jenita Alistya, Rachmadi Usman

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu kewenangan tersebut adalah membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah *waarmerking*. Dalam praktiknya, *waarmerking* sering digunakan masyarakat untuk memberikan kepastian tanggal terhadap suatu dokumen yang dibuat secara di bawah tangan, berbeda dengan legalisasi, dalam *waarmerking* Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dokumen. Dokumen yang diajukan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sehingga Notaris hanya melakukan pencatatan atau pendaftaran dokumen dalam buku khusus dan memberikan kepastian tanggal (*date certain*). Oleh karena itu, Notaris tidak mengetahui secara langsung siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan tidak dapat menjamin keaslian tanda tangan yang tercantum di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kewenangan Notaris dalam pelaksanaan *waarmerking* terhadap surat di bawah tangan dan menganalisis implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan dalam surat di bawah tangan yang telah di-*waarmerking*.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer berupa KUHPerdara dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam *waarmerking*.

Waarmerking adalah proses pendaftaran surat di bawah tangan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak. Notaris hanya mencatat dokumen tersebut dalam register dan memberikan kepastian tanggal pendaftaran. Dalam hal

ini, Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dan tidak memverifikasi identitas maupun keaslian tanda tangan para pihak. Karena hanya memberikan kepastian tanggal, dokumen yang di-*waarmerking* tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan tidak berubah menjadi akta autentik. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Notaris dalam proses *waarmerking* berfungsi sebagai pihak yang melakukan pendaftaran dokumen dan bukan sebagai pembuat akta. Oleh karena itu, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi maupun keaslian tanda tangan yang terdapat dalam surat di bawah tangan yang didaftarkan. Apabila kemudian terbukti terdapat pemalsuan tanda tangan, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang pelaksanaan *waarmerking* dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan Notaris dalam pemalsuan tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam *waarmerking* terbatas pada pendaftaran dan pencatatan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus guna memberikan kepastian tanggal. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi dokumen yang didaftarkan. Apabila ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-*waarmerking*, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris dan tidak terlibat dalam tindakan pemalsuan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan *waarmerking*.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM
DILAKUKANNYA PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN
(WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN

Oleh :

Flora Jenita Alistya, Rachmadi Usman

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, *Waarmerking*, Surat di Bawah Tangan, Pemalsuan Tanda Tangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pelaksanaan *waarmerking* terhadap surat di bawah tangan serta menganalisis implikasi hukum terhadap jabatan Notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam *waarmerking* hanya sebatas melakukan pendaftaran atau pembukuan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus serta memberikan kepastian tanggal terhadap dokumen tersebut. Dalam pelaksanaan *waarmerking*, Notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan dokumen dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai maupun menjamin keaslian tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, apabila ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-*waarmerking*, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak terdapat unsur kesengajaan maupun keterlibatan dalam tindakan pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai fungsi *waarmerking* serta penguatan perlindungan hukum bagi Notaris guna menghindari kesalahpahaman mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan.

**LEGAL PROTECTION OF NOTARIAL POSITION WITH REGARDS TO
REGISTRATION OF UNAUTHENTIC DOCUMENTS (WAARMERKING)
IN CASE THE THIRD PARTY'S FALSIFIED SIGNATURE**

By:

Flora Jenita Alistya¹, Rachmadi Usman²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Legal Protection, Notary, Waarmerking, Unauthentic Document, Falsified Signature

The goals of this study are to analyze the Notary's authority in the implementation of *waarmerking* on unauthentic documents and to analyze the legal implication on Notary's position in case there is falsification of signature in the documents which have been registered. The method of this study is normative legal research using statute approach and conceptual approach. The legal resources utilized consist of primary, secondary, and tertiary ones with descriptive qualitative analysis. The findings of the research indicate that the Notary's authority in the implementation of *waarmerking* is simply limited to carry out registration or logbooking of unauthentic documents into special logbook and give certainty of date of the said documents. In the realization of *waarmerking*, the Notary does not witness the signing process of the documents and does not have authority to judge and to guarantee the originality of the parties' signatures. Therefore, if falsification of signatures is found in the said documents which have registered by *waarmerking*, in principle the liability lies in the hand of the party who has committed the forgery. The Notary cannot be legally held liable as long as he has performed his authority in accordance to the provisions of Notary Profession Act and there is no element of on purpose and his involment in the said forgery action. Legal protection for the Notaries is granted as a form of guarantee of legal certainty in performing their professional authority in accordance with the prevailing legislation. The findings of the research indicate that better understanding of the society is required on the function of *waarmerking* and empowerment of legal protection for the Notaries in order to avoid misunderstanding on the limit of Notary's responsibility upon the unauthentic documents which have been registered.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216320007

² Supervisor

Drs. Werhan Asmori, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala kebijakan akademik dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Magister Kenotariatan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan dukungan selama proses studi.
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan pengalaman akademis yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala bantuan administratif dan kemudahan yang diberikan selama proses studi.
6. Orang tua penulis yang tercinta, atas doa yang tidak pernah putus, cinta kasih yang tulus, serta pengorbanan dan dukungan moral maupun

materiil yang menjadi landasan kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini.

7. Teman-teman penulis rekan-satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, dan menjadi sumbangsih kecil yang berarti bagi masyarakat.

Banjarmasin, 07 Juli 2026



FLORA JENITA ALISTYA
NIM 2420216320007

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER)	
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	9
D. TUJUAN PENELITIAN	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN	12
F. TINJAUAN PUSTAKA	13
G. METODE PENELITIAN	23
H. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT DALAM SEBUAH SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DI-WAARMERKING	28
A. KEKUATAN SURAT DI BAWAH TANGAN	28
B. KARAKTERISTIK WAARMERKING SEBAGAI KEWENANGAN NOTARIS	35
C. FUNGSI DIDAFTARKANNYA WAARMERKING DALAM BUKU KHUSUS OLEH NOTARIS	40
BAB III IMPLIKASI HUKUM PADA JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN DIDAFTARKAN (WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN -	53
A. KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM.....	53
B. PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM WAARMERKING AKTA DI BAWAH TANGAN	60
C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENDAFTARKAN SURAT DI BAWAH TANGAN	70

BAB IV PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

